



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
SUB UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INSIYATUN**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **656315**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m²/3 m² di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2.23 m²/1.67 m² di SAMPANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 251.000.000

1. MOBIL, MITSUBISI EXPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK/CV 150 R Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. 11.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.340.846

F. HARTA LAINNYA Rp. 11.000.000

Sub Total Rp. 1.404.340.846

III. HUTANG Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.204.340.846

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Desember 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
SUB UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LUDDIN**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **637296**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/15 m2 di SAMPANG, WARISAN Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/30 m2 di SAMPANG, WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.927.043

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 660.927.043

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 660.927.043

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
SUB UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHALLI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632958

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.983.700.000

1. Tanah Seluas 77 m2 di BANGKALAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 46.200.000
2. Tanah Seluas 3500 m2 di SAMPANG, WARISAN Rp. 1.750.000.000
3. Tanah Seluas 750 m2 di SAMPANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 187.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 153.500.000

1. MOTOR, YAMAHA NMIX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G F601RM Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 100.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.137.300.000

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.137.300.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 November 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
SUB UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARIYANTO**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **632907**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **650.000.000**

1. Tanah Seluas 95 m2 di SAMPANG, LAINNYA Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 123 m2 di KOTABARU, WARISAN Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **351.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, LAINNYA Rp. 120.000.000
6. MOBIL, IZUZU DUMPTRUK Tahun 2012, LAINNYA Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **23.297.827**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.024.297.827**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.024.297.827**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Desember 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
SUB UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNUS ALI GHAFI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632875

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	425.000.000
1. Tanah Seluas 219 m2 di SAMPANG, WARISAN	Rp.	425.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	25.000.000
1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2018, LAINNYA	Rp.	12.000.000
2. MOTOR, ZUSUKI BEBEK Tahun 2013, LAINNYA	Rp.	7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2011, LAINNYA	Rp.	6.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	454.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	454.500.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Desember 2020**.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.